



Solidaritas Perempuan  
Women's Solidarity for Human Rights



# FEMINISASI PEMISKINAN DAN TANTANGAN UNTUK MENYELESAIKAN KETIDAKADILAN GENDER DALAM MASYARAKAT DI INDONESIA

# **FEMINISASI PEMISKINAN DAN TANTANGAN UNTUK MENYELESAIKAN KETIDAKADILAN GENDER DALAM MASYARAKAT DI INDONESIA**

## **Penulis**

Arieska Kurniawaty  
Salsabila Putri Noor Aziziah  
Siti Zulaika

**Desain Sampul dan Visualisasi Isi**  
Doc.Stud

Diterbitkan pertama kali dalam edisi bahasa Indonesia oleh  
**Solidaritas Perempuan**

Jalan Jatisari No. 12A Jatipadang, Jakarta Selatan  
email: soliper@centrin.net.id  
Juli, 2023





## KATA PENGANTAR

Pandemi COVID telah membawa kenyataan pahit bahwa ketimpangan ekonomi dan gender tak hanya semakin memiskinkan perempuan. Namun membunuh manusia secara perlahan. Ada banyak orang yang meninggal dunia karena tidak mendapatkan perawatan rumah sakit maupun oksigen pada saat mendesak. Ada sebagian yang kelaparan karena tidak mampu membeli makanan akibat kehilangan pekerjaan maupun sumber kehidupan lainnya. Sebaliknya, kekayaan 10 orang terkaya di dunia naik dua kali lipat sejak pandemi dimulai. Meluasnya dan semakin dalamnya ketimpangan ekonomi dan gender bukanlah kebetulan. Melainkan pilihan paradigma pembangunan yang dilakukan saat kebijakan struktural dibuat untuk kelompok yang paling berkuasa dan memiliki modal.

Solidaritas Perempuan telah melakukan konsultasi wilayah di 6 daerah untuk mengumpulkan narasi pengalaman perempuan mengenai ketidakadilan gender dan ekonomi yang dihadapi di akar rumput. Narasi ini kemudian menggambarkan pelanggengan feminisasi pemiskinan yang dilakukan oleh berbagai aktor: Negara, Korporasi hingga Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional. Buku ini merupakan dokumentasi narasi situasi ketimpangan ekonomi dan gender di enam wilayah yang merujuk pada ketidaksetaraan yang terjadi dalam perbedaan penghasilan, kesempatan dalam pekerjaan, akses terhadap dan kontrol atas pendidikan dan sumber daya, serta kuasa dan representasi di antara gender yang berbeda.

Ketimpangan ekonomi dan gender saling berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain yang muncul bukan hanya karena masalah perlakuan atau keterwakilan yang tidak setara bagi perempuan. Melainkan juga akibat dari kondisi dan hubungan ekonomi yang dilakukan untuk merugikan perempuan dan memperkuat stereotip gender sebagai pangkal dari berbagai bentuk ketidakadilan gender. Untuk itu, kita membutuhkan solusi yang sistemik. Yakni dengan menghapus ketimpangan struktural dalam kerangka gender, ras, etnis dan kasta yang memperkuat kesenjangan ekonomi.

**Dinda Nuur Annisaa Yura**  
Ketua Badan Eksekutif Nasional  
Solidaritas Perempuan

# DAFTAR ISI

Menyoroti Ketimpangan Ekonomi dan Gender dalam Narasi Global

01

Fakta Ketimpangan Ekonomi dan Gender di Indonesia: Wajah Pemiskinan Perempuan di Enam Wilayah

05

Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Sumbawa

05

Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Jabotabek

13

Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah

22

Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Provinsi Aceh

34

Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Sumatera Selatan

40

Memaknai Ketimpangan sebagai Ketidakadilan Gender dan Feminisasi Pemiskinan

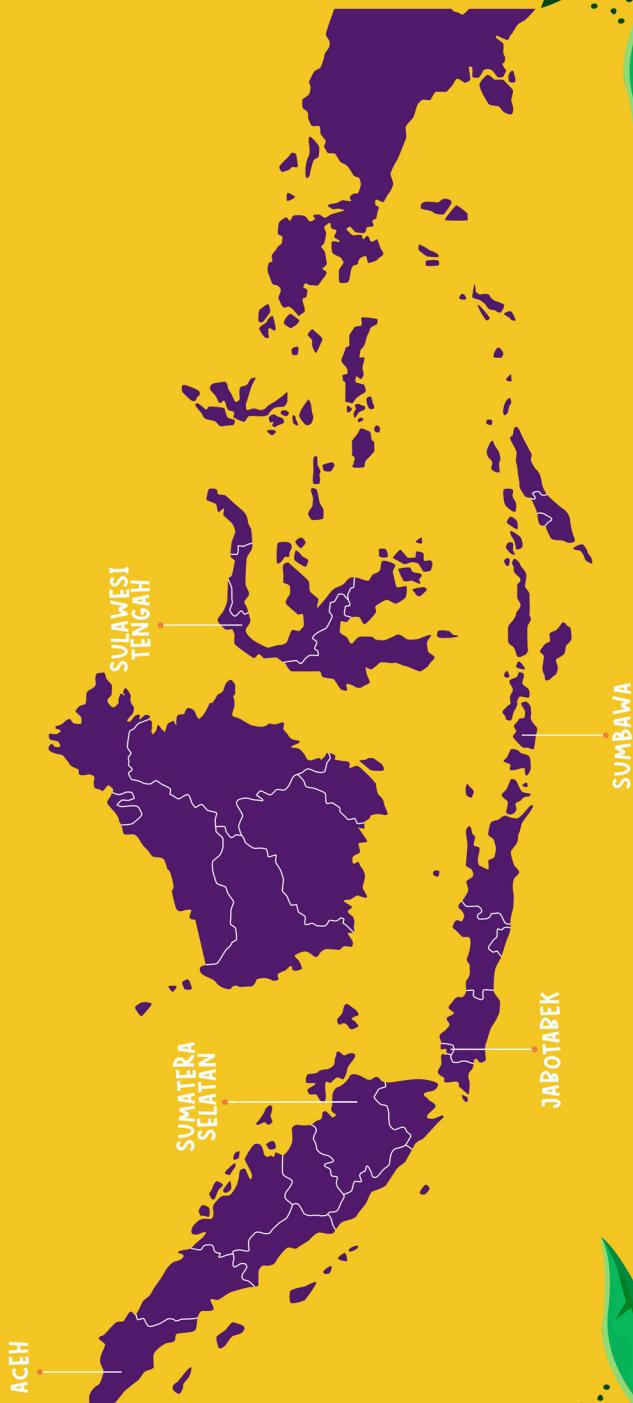
46

## DAFTAR PUSAKA

51



# WAJAH PEMISKINAN PEREMPUAN DI ENAM WILAYAH



# MENYOROTI KETIMPANGAN EKONOMI DAN GENDER DALAM NARASI GLOBAL

Jika mengingat kembali pada 2019, saat pandemi COVID-19 mencapai puncaknya akibat varian delta, maka kita akan teringat pada suasana yang sangat mencekam. Hingga kini, dampak berkelanjutan dari COVID-19 juga masih dirasakan oleh banyak orang. Berkelindan dengan dampak krisis lainnya, seperti krisis iklim, krisis pangan, krisis ekonomi, krisis sosial hingga krisis ekologis. Meski setiap orang mengalami situasi yang sama, namun ada sebagian orang yang memiliki keistimewaan (*privilege*) yang tidak dimiliki oleh sebagian besar orang di dalam masyarakat. Keistimewaan untuk mendapatkan layanan kesehatan naratama, keistimewaan untuk bisa tetap aman di rumah saja tanpa harus kelaparan karena pendapatan yang terjamin, dan seterusnya. Tak hanya itu, krisis ini nyatanya juga membuka peluang bagi kelompok yang memiliki kuasa untuk mengeruk keuntungan. Yang paling kaya menjadi lebih kaya secara dramatis. Bahkan beberapa perusahaan mencapai rekor tertinggi dalam perolehan untung di masa pandemi COVID-19. Tax Justice UK dalam publikasinya yang berjudul "*Pandemic Profits: Who cashing in during Covid?*"<sup>1</sup> memberikan contoh bagaimana *Scottish Mortgage Investment Trust* mengalami kenaikan laba sebesar 801% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam laporan tersebut juga dianalisa bagaimana keuntungan itu diperoleh, yakni memanfaatkan pengeluaran pandemi oleh pemerintah. Ini adalah satu fakta akan ketimpangan.

Analisis Oxfam menunjukkan bahwa setidaknya 1,7 miliar buruh di seluruh dunia akan mengalami inflasi yang melebihi upah mereka pada tahun 2022, dan terjadi penurunan kemampuan untuk membeli makanan bagi keluarganya atau bahkan untuk membayar listrik agar rumahnya tetap terang. Banyak negara menghadapi kebangkrutan dengan tagihan utang yang

<sup>1</sup> Tax Justice UK. Pandemic Profits. September 2021. Diakses dari [https://www.taxjustice.uk/uploads/1/0/0/3/100363766/pandemic\\_profits\\_-\\_final.pdf](https://www.taxjustice.uk/uploads/1/0/0/3/100363766/pandemic_profits_-_final.pdf)

semakin tidak terkendali. Sehingga diantaranya banyak yang merencanakan pemotongan anggaran nasionalnya. Selama 10 tahun terakhir, 1% umat manusia terkaya telah meraup lebih dari setengah kekayaan global yang dihasilkan.<sup>2</sup> Pandemi COVID-19 dimanfaatkan untuk meraup keuntungan oleh satu pihak dan menindas pihak lainnya, sehingga terjadi ledakan ketimpangan di tingkat global. Krisis multidimensi akibat COVID-19 telah memperdalam dan memperluas ketimpangan ekonomi yang telah ada.

Pada narasi global, ketimpangan ekonomi senantiasa berkelindan dengan ketimpangan gender dalam cara yang kompleks. Akibat faktor sejarah dan budaya yang mengakar, sulit untuk menentukan kapan tepatnya persoalan ketimpangan ekonomi dan gender ini muncul. Pembagian kerja berdasarkan gender dalam aktivitas ekonomi manusia telah berlangsung selama berabad-abad, termasuk fakta bahwa perempuan sering dikecualikan dari peluang ekonomi formal maupun dianggap tidak produktif secara ekonomi akibat peran reproduktifnya.

Persoalan ketimpangan gender dan ekonomi telah menjadi banyak perbincangan di kalangan luas dalam beberapa dekade terakhir. Seiring dengan semakin banyaknya penelitian yang mendokumentasikan persoalan ketimpangan ini dan dampak negatifnya terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Di antaranya Oxfam yang menyebutkan bahwa 1% orang terkaya mengantongi kekayaan hampir dua kali lipat dari yang dikumpulkan seluruh dunia selama dua tahun terakhir.<sup>3</sup> Juga *world inequality lab* yang mengelola *World Inequality Database*, sebagai database publik yang menunjukkan dinamika ketimpangan di tingkat global. Berdasarkan laporan *World Inequality Report 2022*, disebutkan bahwa ketimpangan global

---

<sup>2</sup> Oxfam. Briefing Paper: Survival of the Richest. Januari 2023. Diakses dari <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621477/bp-survival-of-the-richest-160123-en.pdf>

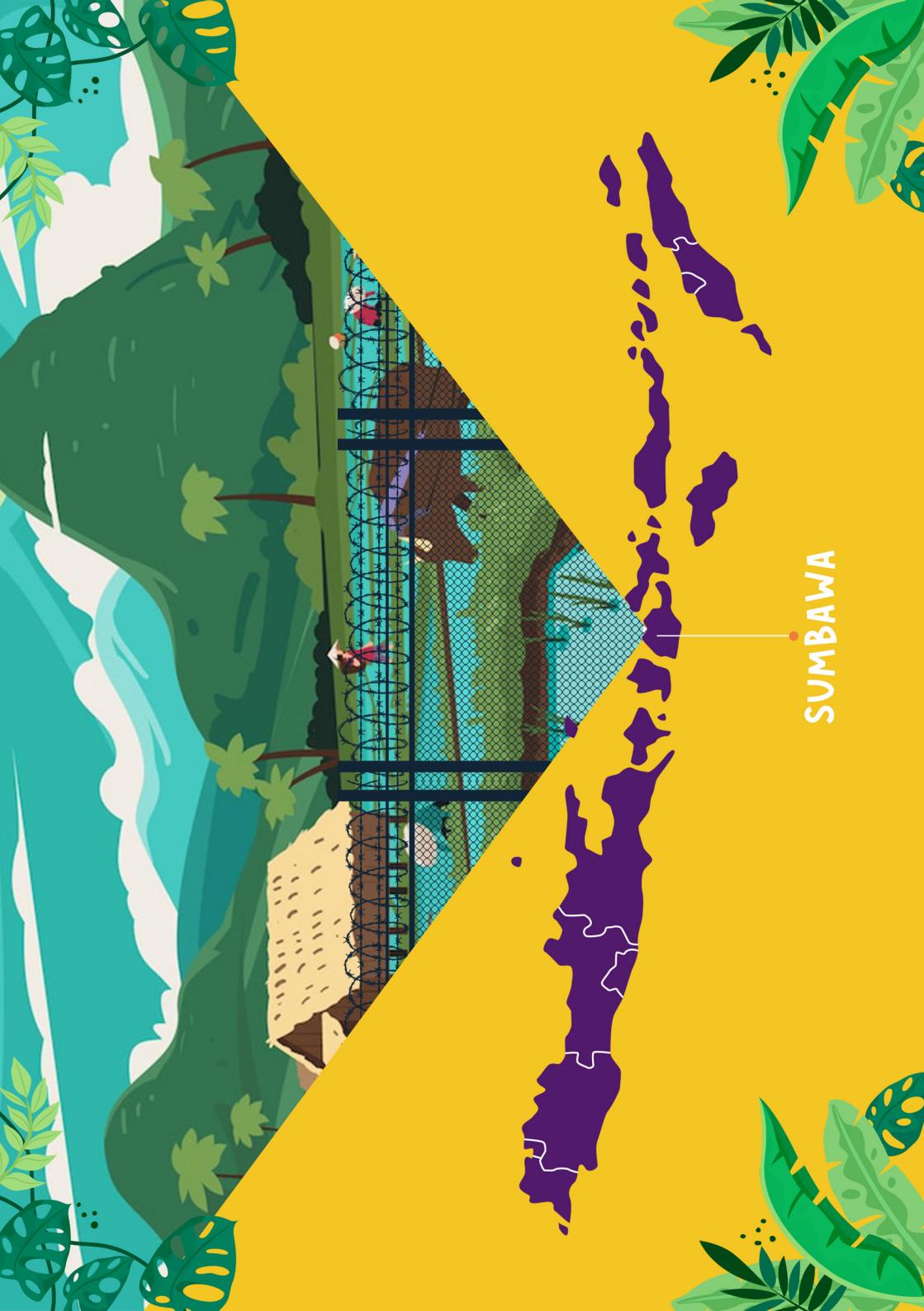
<sup>3</sup> Oxfam. Press Release Richest 1% bag nearly twice as much wealth as the rest of the world put together over the past two years. 16 Januari 2023. Diakses dari <https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-much-wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years#:~:text=The%20richest%201%20percent%20grabbed.half%20of%20all%20new%20wealth.>

yang terjadi saat ini sama dengan ketimpangan yang terjadi saat imperialisme Barat mencapai puncaknya di sekitar awal abad ke-20. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara-negara dunia berkembang berupaya mengejar pertumbuhan ekonomi, namun dunia tetap tidak setara hingga saat ini. Bahkan informasi ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di dalam suatu negara lebih besar daripada ketimpangan yang terjadi antar negara.<sup>4</sup>

Sejarah juga menunjukkan bahwa ketimpangan gender merupakan salah satu bentuk ketimpangan yang paling tua dan paling menyebar serta membentuk model ekonomi di tengah masyarakat. Perempuan dan anak perempuan secara sistematis didiskriminasi dan ditolak haknya karena jenis kelaminnya. Perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan, memiliki lebih sedikit sumber daya dan terbatas pada ruang pengambilan keputusan jika dibandingkan dengan laki-laki. Sebagai contoh, perempuan petani mengalami tantangan dalam mengakses lahan yang membatasi kapasitasnya dalam bercocok tanam maupun memelihara ternak.

---

<sup>4</sup> World Inequality Report. Global inequality from 1820 to now: the persistence and mutation of extreme inequality. 2023. Diakses dari <https://wir2022.wid.world/chapter-2/>



SUMBAWA



# FAKTA KETIMPANGAN EKONOMI DAN GENDER DI INDONESIA: WAJAH PEMISKINAN PEREMPUAN DI ENAM WILAYAH



## Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Sumbawa

### *Latar Belakang*

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia, ketimpangan gender dan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Sumbawa masih signifikan. Pada konteks ketimpangan gender, tingkat partisipasi kerja perempuan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terlihat dari Survei Sosial-Ekonomi Nasional di tahun 2019, bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Kabupaten Sumbawa hanyalah 63,4% jika dibandingkan laki-laki yang mencapai 95,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kesenjangan yang signifikan dalam hal akses kesempatan kerja untuk perempuan dalam lingkup Kabupaten.

Selain itu, perempuan cenderung untuk menempati pekerjaan dengan upah yang rendah dan dengan kerentanan yang tinggi. Rata-rata upah yang diterima oleh pekerja perempuan di Kabupaten Sumbawa hanyalah sekitar Rp. 1.500.000 atau sekitar USD 100 setiap bulan, yang mana jauh lebih rendah daripada rerata tingkat upah bagi pekerja laki-laki.

Sedangkan yang terkait dengan ketimpangan ekonomi, kemiskinan masih berpengaruh secara signifikan terhadap sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Tingkat kemiskinan lebih banyak dialami oleh perempuan kepala keluarga, dengan 21,3% perempuan kepala keluarga hidup di bawah garis kemiskinan jika dibandingkan dengan 16,5% dari laki-laki kepala keluarga.

Konteks tersebut mewakili gambaran bagaimana ketimpangan gender dan ekonomi masih signifikan, dengan perempuan menghadapi ruang partisipasi yang minim, upah rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif untuk mengatasi persoalan ini dan mendorong keadilan gender serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa.



*Pasagi ponan atau biasa disebut ponan merupakan sebuah tradisi sebagai bentuk rasa syukur pada saat padi akan berbuah atau bunting. Tradisi ini dilakukan oleh beberapa desa di Kabupaten Sumbawa, tepatnya Kecamatan Moyo Hilir. Foto oleh thelangkahtravel.com*

### *Dampak Ketimpangan Ekstrem yang Dirasakan oleh Perempuan di Kabupaten Sumbawa*

Ketimpangan gender dan ekonomi yang ekstrem di Kabupaten Sumbawa mengakibatkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok miskin. Di antaranya adalah:

Akses yang terbatas terhadap pendidikan, bahwa perempuan yang berasal dari keluarga yang miskin seringkali memiliki akses terhadap pendidikan yang dapat melanggengkan kemiskinan itu sendiri. Tanpa akses terhadap pendidikan, perempuan dapat kehilangan peluang kerja yang membutuhkan kapasitas

dan pengetahuan tertentu, sehingga sangat mungkin mereka memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mengembangkan mobilitas sosialnya.

Tak hanya pendidikan, dampak juga dirasakan dalam hal kesehatan. Hal ini karena upah yang rendah dan kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi kesehatan perempuan dan keluarga miskin. Di Kabupaten Sumbawa, perempuan dan anak-anak lebih mungkin mengalami malnutrisi dan persoalan kesehatan karena kemiskinan yang dialaminya. Kemiskinan juga menghalangi akses terhadap air bersih, sanitasi dan layanan kesehatan, yang mengarah pada tingginya tingkat infeksi penyakit.

Selain itu, perempuan juga dikecualikan dalam proses pengambilan keputusan. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan dan keluarga miskin memiliki akses yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan di komunitasnya sehingga dapat berakibat negatif terhadap kemampuannya untuk menyampaikan persoalan yang berpengaruh terhadap kehidupannya. Dikecualikannya perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga berarti bahwa perempuan tidak memiliki kesempatan untuk memberi masukan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan perempuan dan keluarganya.

Dampak lain yang juga dirasakan adalah terbatasnya peluang ekonomi. Hal ini karena ketimpangan ekonomi dapat melanggengkan siklus kemiskinan. Perempuan yang memiliki peluang kerja yang lebih sempit, contohnya, terpaksa untuk tergantung pada pekerjaan dengan upah yang rendah seperti pedagang kaki lima dengan upah yang tidak mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini pada akhirnya dapat mengarah pada rendahnya produktivitas dan membatasi pertumbuhan ekonomi di wilayah.

Secara umum, ketimpangan gender dan ekonomi di Kabupaten Sumbawa dapat menghasilkan kemiskinan dan membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan juga membatasi peluang ekonomi dan kesempatan hidup.



Konsultasi Wilayah Solidaritas Perempuan Sumbawa, 2022. Foto oleh Solidaritas Perempuan Sumbawa.

Konsultasi wilayah yang dilakukan Solidaritas Perempuan Sumbawa dan melibatkan 27 perempuan dari Desa Tarusa, Desa Poto, Desa Lengas dan Desa Pelat. telah mengurai konteks ketimpangan gender dan ekonomi yang dialami perempuan akar rumput. Diantara konteks yang muncul adalah ketimpangan gender dan ekonomi di sektor pertanian yang pada akhirnya berpengaruh terhadap migrasi kerja ke luar negeri dengan segala kerentanannya.

#### *Ketimpangan Gender dan Ekonomi pada Sektor Pertanian di Kabupaten Sumbawa*

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, terdapat sekitar 131.000 orang yang bekerja di sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa. Dari jumlah tersebut, sekitar 57% adalah perempuan. Meskipun perempuan memiliki andil yang besar dalam sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa, namun akses mereka terhadap sumber daya dan teknologi pertanian masih terbatas. Berikut ini beberapa fakta tentang situasi perempuan dalam sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa:

**Keterbatasan akses terhadap lahan pertanian:** Perempuan di Kabupaten Sumbawa seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke lahan pertanian, baik sebagai pemilik maupun penggarap. Keterbatasan ini yang kemudian membatasi potensi mereka dalam melakukan usaha pertanian yang produktif. Sumbawa adalah wilayah yang masih sangat

konservatif, dan tradisi lokal masih memandang perempuan sebagai ‘penjaga rumah’, yang membatasi perempuan dalam aktivitas luar rumah dan khususnya sektor pertanian. Perempuan Sumbawa seringkali tidak secara resmi terdaftar sebagai pemilik lahan, meskipun memiliki akses terhadap lahan tersebut melalui keluarga atau suami mereka. Sehingga perempuan masih sangat tergantung pada suami atau keluarganya yang laki-laki.

**Keterbatasan akses terhadap modal dan kredit:** Perempuan di Kabupaten Sumbawa seringkali memiliki keterbatasan dalam mengakses kredit dan modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Salah satu dampak dari keterbatasan akses terhadap lahan adalah perempuan tidak bisa mendapatkan kredit karena tidak memiliki jaminan material atau keuangan yang memadai. Oleh karena perempuan di Sumbawa seringkali tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit, terutama dalam bentuk tunai. Selain itu masih ada juga persepsi bahwa perempuan tidak cakap dalam aspek keuangan dan bisnis.

**Keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian:** Keterbatasan akses terhadap teknologi dan pengetahuan dalam bidang pertanian sering dialami oleh perempuan di Kabupaten Sumbawa. Beberapa teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, seperti penggunaan pupuk organik atau sistem irigasi yang efisien, masih belum tersedia bagi sebagian besar perempuan petani. Pengetahuan lokal perempuan dalam pengelolaan pertanian di Sumbawa semakin tergerus oleh modernisasi melalui mekanisasi pertanian. Pengetahuan yang biasanya didasarkan pada pengalaman dan pengamatan dari generasi ke generasi dan diwariskan dalam bentuk tutur dari ibu ke anak perempuan. Namun, mekanisasi pertanian telah membuat perempuan petani kehilangan kesempatan untuk belajar dan dari pengetahuan lokalnya. Padahal pengetahuan lokal yang baik dalam pertanian juga mencakup pengetahuan mengenai identitas budaya lokal seperti cara menanam, memanen, dan mengolah makanan yang berasal dari tradisi. Termasuk juga terkait dengan budaya kerja sama yang terbangun di masyarakat, seperti pertukaran varietas dan berbagai upacara yang berkaitan dengan pertanian dan musim tanam.

**Keterlibatan dalam kegiatan pengolah makanan:** Perempuan di Kabupaten Sumbawa seringkali terlibat dalam kegiatan pengolahan makanan, termasuk dalam memproduksi makanan tradisional khas Sumbawa. Namun, sebagian besar perempuan di sektor ini masih bekerja secara informal dan seringkali tidak memiliki akses ke pasar dan teknologi modern.

***Kotak 1. Cerita perempuan petani dari Desa Pelat***

“Kita sebagai petani sangat membutuhkan pupuk, pupuk saat ini langka dan harga tinggi, dimana harga normal pupuk seharga Rp. 130.000 itu sih rata – rata petani yang dibutuhkan dan sekarang harga pupuk di desa Pelat mencapai Rp. 180.000, itu sih yang paling dibutuhkan petani saat ini”

***Ketimpangan Gender dan Ekonomi yang Dialami Perempuan Buruh Migran dari Sumbawa***

Situasi tersebut tak jarang mendorong perempuan di Kabupaten Sumbawa untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Hal ini diperparah dengan tekanan sosial dalam bentuk stereotip gender dan ekspektasi sosial yang mempengaruhi keputusan bagi perempuan untuk bermigrasi kerja ke luar negeri. Misalnya, perempuan dapat merasa terpaksa untuk membantu keluarga terdekat yang membutuhkan dukungan finansial sehingga memilih untuk bermigrasi kerja ke luar negeri sebagai cara untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Sehingga budaya di Sumbawa berkontribusi terhadap peningkatan jumlah perempuan menjadi buruh migran. Budaya yang memandang perempuan sebagai penghasil di rumah tangga membuat mereka terbelenggu dengan konstruksi genderanya yang mempersepsi perempuan di kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk mengambil peran dalam pengambilan keputusan dan mendapat akses kepada sumber daya, peluang pendidikan, dan lapangan kerja yang setara dengan laki-laki. Kondisi ini memunculkan ketidakmerataan hak yang mengakibatkan perempuan menghadapi keterbatasan pilihan dan kekurangan kesempatan di sektor formal.

Dengan demikian, selain menjadi buruh migran di sektor formal di luar negeri, perempuan dari Kabupaten Sumbawa lebih banyak yang bekerja di sektor domestik, seperti pekerjaan rumah tangga. Beberapa hal yang dihadapi perempuan buruh migran dari Sumbawa termasuk diantaranya adalah diskriminasi gender, kekerasan seksual, upah yang rendah, jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang tidak aman dan kurangnya akses untuk layanan kesehatan dan pendidikan. Perempuan juga sering mengalami kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum di negara tujuan bekerja.



### ***Kotak 2. Cerita perempuan buruh migran dari Desa Poto***

“Saya bekerja (sebagai buruh migran) namun tidak sesuai kontrak dimana tidak bisa sholat, komunikasi sehingga suami memutuskan untuk saya harus dipulangkan. Pada saat saya kembali ke rumah, di rumah yang menjadi tulang punggung dan menjadi kepala keluarga adalah suami dan saya harus mengikuti apa kata suami. Sangat jarang sekali pendapat saya didengar. Saya ingin berangkat tapi suami tidak mengizinkan namun disini juga susah untuk memenuhi kebutuhan dan biasanya saya berjualan di pasar dan ambil ongkos jadi lahan orang”.

### ***Kesimpulan***

Kabupaten Sumbawa mengalami ketimpangan gender dan ekonomi yang signifikan, yang mempengaruhi akses perempuan ke sumber daya, peluang, dan pengambilan keputusan. Dampak situasi ini sangat terasa bagi perempuan di sektor pertanian dan perempuan buruh migran.

Perempuan dalam sektor pertanian memiliki keterbatasan akses dan kendala dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Faktor seperti kebijakan Pemerintah yang tidak sensitif gender, kurangnya akses ke modal dan teknologi pertanian, dan keterbatasan akses perempuan petani terhadap informasi memperburuk situasi. Akibatnya, perempuan petani sering mengalami ketimpangan ekonomi dan kesenjangan kesempatan.



JABOTABEK

Sementara itu, banyak perempuan di Sumbawa terpaksa menjadi buruh migran karena kekurangan kesempatan kerja dan penghasilan yang layak. Faktor budaya dan tradisi turut mempengaruhi tingginya angka buruh migran perempuan di Sumbawa. Dampak dari meningkatnya perempuan menjadi buruh migran mencakup meningkatnya risiko eksplorasi, ketidakamanan, dan diskriminasi. Anak-anak perempuan juga menanggung beban kerja rumah tangga yang lebih besar akibat migrasi pekerjaan ibu.

## Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Jabotabek

### *Latar Belakang*

Wilayah Jabotabek adalah akronim dari Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Wilayah ini terdiri dari beberapa kota dan daerah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang saling berdekatan dan menjadi kawasan metropolitan terpadat di Jakarta. Dengan luas sekitar 6.200 km persegi dan memiliki populasi lebih dari 30 juta jiwa, wilayah ini menjadi pusat perekonomian dan bisnis di Indonesia. Area ini merupakan tempat bagi beberapa industri, pabrik, bisnis dan sektor jasa dan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia.

Meskipun Jabotabek merupakan wilayah metropolitan yang padat dan banyak peluang kerja, namun situasi kemiskinan di wilayah ini masih cukup signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020, angka kemiskinan di wilayah Jabotabek mencapai 3,95% atau sekitar 1,6 juta orang. Dari sumber yang sama, pengukuran indeks Gini di wilayah Jabotabek mencapai 0,389. Beberapa faktor kemiskinan di Jabotabek antara lain tingginya biaya hidup dan harga sewa rumah termasuk layanan publik yang sangat mahal, tidak adanya kebijakan yang memberikan peluang kerja bagi masyarakat miskin dan rendahnya kualitas pendidikan bagi anak-anak dan keluarga miskin. Selain itu, juga terdapat banyaknya pekerja informal dan buruh harian yang tidak memiliki jaminan sosial.

Situasi ketimpangan ekonomi dan gender di Jabotabek juga cukup signifikan. Di wilayah ini terdapat perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, serta antara masyarakat kaya dan miskin. Data BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa rasio penghasilan tertinggi antara 10% teratas dan 10% terbawah di wilayah Jabotabek mencapai lebih dari 19 kali lipat. Akan tetapi, ketimpangan ekonomi antar kota di Jabotabek juga cukup signifikan. Jakarta, sebagai ibu kota, menjadi kota paling maju di kawasan ini dengan PDB per kapita yang lebih tinggi. Di sisi lain, Bogor, Tangerang dan Bekasi relatif tertinggal jika dibandingkan dengan Jakarta. Wilayah-wilayah tersebut memiliki PDB per kapita yang lebih rendah, tingkat pekerjaan dan infrastruktur layanan dasar.

Menurut data statistik di tahun 2020 yang tersedia dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta memiliki angka Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita tertinggi sebesar Rp. 285 juta dibandingkan dengan Bogor (Rp. 42 juta), Tangerang (Rp. 49 juta) dan Bekasi (sejumlah Rp. 68 juta). Akses ke layanan dasar juga merupakan indikator penting ketimpangan ekonomi. Jakarta memiliki persentase rumah tangga terkoneksi jaringan air perpipaan tertinggi sebesar 98,01%, diikuti oleh Tangerang sebesar 62,30%, Bogor sebesar 59,36%, dan Bekasi sebesar 54,68%. Untuk tingkat kemiskinan, Jakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah sebesar 2,82%, diikuti oleh Tangerang sebesar 3,63%, Bogor sebesar 8,64%, dan Bekasi sebesar 6,07%.

Di samping itu, kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan juga sangat terlihat terutama pada upah pekerja. Rata-rata, penghasilan perempuan di Jabotabek lebih rendah dibandingkan dengan penghasilan laki-laki di wilayah yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya diskriminasi gender dalam akses terhadap pekerjaan dengan upah tinggi, peluang lapangan kerja yang lebih sedikit bagi perempuan, serta peran dan tanggung jawab yang dimiliki perempuan di rumah tangga.



*Situasi kehidupan masyarakat Jakarta di wilayah kumuh. Foto oleh Jonathan McIntosh, CC BY 2.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>>, via Wikimedia Commons*

### *Dampak Ketimpangan Ekstrem yang Dirasakan oleh Perempuan di Jabotabek*

Bagi perempuan di Jakarta, khususnya yang terpinggirkan di daerah kumuh atau sektor informal, mengalami dampak ketimpangan gender dan ekonomi yang sangat signifikan. Perempuan lebih sering mengalami kemiskinan daripada laki-laki karena perempuan menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan dan pekerjaan.

Kesenjangan upah berdasarkan gender di Jakarta juga besar, dan perempuan lebih mungkin dipekerjakan dalam pekerjaan bergaji rendah dan tidak aman di sektor informal. Terbatasnya sumber daya keuangan, modal dan peluang usaha bagi perempuan juga menjadi tantangan besar. Akibatnya perempuan mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi, kerawanan pangan dan layanan kesehatan yang buruk. Perempuan di Jakarta, terutama bagi yang miskin atau tinggal di kawasan kumuh punya keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Perempuan miskin juga mengalami tingkat kekerasan berbasis gender dan eksplorasi seksual yang lebih tinggi. Hal tersebut diperparah dengan beban pekerjaan rumah

tangga dan perawatan yang terpaksa dipikul oleh perempuan hingga menjadikan terbatasnya otonomi dan kekuatan pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan tubuh, pikiran, ruang gerak hingga hasil kerja perempuan.



Konsultasi wilayah di Rawabadak - Jakarta. Foto oleh Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan

Konsultasi wilayah yang dilakukan Solidaritas Perempuan Jabotabek dan melibatkan 38 perempuan dari Kelurahan Muara Angke, Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Cilincing telah mengurai konteks ketimpangan gender dan ekonomi yang dialami perempuan akar rumput. Diantara konteks yang muncul adalah ketimpangan gender dan ekonomi yang semakin sulit dihadapi setelah krisis COVID-19 dan buruknya layanan dasar esensial, khususnya air bersih. Selain itu, situasi yang semakin sulit juga dihadapi oleh perempuan di pesisir Jakarta yang terpinggirkan akibat pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dan Tangkul Laut.

#### *Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Jabotabek akibat Krisis COVID-19*

Jakarta merupakan wilayah yang paling terdampak dari penyebaran COVID-19. Dan pandemi COVID-19 memperburuk situasi ketimpangan yang dialami perempuan di Jakarta. Perempuan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan pekerjaan bergaji rendah, paling terpukul oleh pandemi dan dampak ekonominya. Banyak perempuan di Jakarta kehilangan

pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi. Menurut survei Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), perempuan di Indonesia lebih mungkin kehilangan pekerjaan daripada laki-laki selama pandemi. Di Jakarta, tingkat pengangguran perempuan naik menjadi 8,8% pada Februari 2021, sedangkan tingkat pengangguran laki-laki sebesar 6,3%.

Selain itu, pandemi juga berdampak pada beban pekerjaan perawatan tak berbayar bagi perempuan. Dengan ditutupnya sekolah dan pusat penitipan anak, perempuan harus mengambil tanggung jawab tambahan untuk mengasuh anak dan pekerjaan rumah tangga. Beban kerja yang meningkat ini dapat berdampak negatif pada peluang ekonomi perempuan, karena mereka mungkin memiliki lebih sedikit waktu dan energi untuk berpartisipasi dalam sebagai tenaga kerja formal.

Situasi ini bahkan lebih menantang bagi perempuan di komunitas rentan di Jakarta. Perempuan yang bekerja di sektor informal atau sebagai pekerja rumah tangga seringkali tidak memiliki akses ke mekanisme perlindungan sosial, termasuk asuransi kesehatan, cuti sakit berbayar, dan tunjangan persalinan. Hal ini menempatkan mereka pada risiko kehilangan pendapatan yang lebih tinggi atau menjadi lebih rentan terhadap risiko kesehatan selama pandemi.



### ***Kotak 3. Cerita perempuan dari Kelurahan Cilincing***

"Sebagai seorang ibu rumah tangga di Jakarta, pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari saya. Suami saya kehilangan pekerjaannya dan ini pun mempengaruhi keuangan keluarga. Walau sudah berusaha menghemat pengeluaran untuk makan, tagihan listrik dan air, tapi saya tetap cemas. Sementara gak pernah ada paket yang dibagikan sebagai bantuan."

## Ketimpangan Gender dan Ekonomi akibat Privatisasi Air di Jakarta

### **Kotak 4. Cerita perempuan dari Kelurahan Rawabadak Utara**

“Sejak air disini diambil alih oleh perusahaan swasta, hidup saya makin sulit. Bayar air naik drastis. Padahal kualitasnya jelek. Kudu begadang dulu dini hari supaya air keluar agak kenceng, kalau pagi pas orang pada siap-siap, kran air sih cuma netes doang.”

Perempuan yang terlibat dalam konsultasi wilayah menceritakan bahwa privatisasi air memperparah ketimpangan gender dan ekonomi yang dialami perempuan di Jakarta. Privatisasi air mengakibatkan peningkatan biaya hidup yang dikeluarkan untuk mendapatkan air bersih, sehingga semakin mempersulit keluarga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan akses air bersih. Perempuan yang seringkali menjadi pengurus utama dalam rumah tangganya, menanggung beban mengumpulkan air dan mengelola pasokan air rumah tangga. Dengan demikian, kesulitan mendapatkan air bersih dapat mempengaruhi perempuan di Jakarta, terutama mereka yang berasal dari rumah tangga berpendapatan rendah.

Palyja dan Aetra sebagai operator penyedia layanan air di Jakarta lebih mengutamakan keuntungan daripada layanan publik sebagai hak dasar warga negara. Hal ini menyebabkan mereka lebih memilih investasi infrastruktur dan layanan air di daerah mewah ketimbang daerah berpenghasilan rendah dan daerah kumuh seperti wilayah pesisir. Privatisasi juga berdampak negatif bagi perempuan yang pekerjaannya bergantung pada pekerjaan yang berhubungan dengan air bersih. Misalnya, perempuan yang menjalankan usaha kecil seperti jasa binatu atau penjual makanan. Waktu yang dibutuhkan oleh perempuan untuk mengumpulkan air bersih juga menambah beban kerja domestik perempuan dan mengurangi kesempatannya untuk dapat beraktivitas sosial seperti menghadiri rapat-rapat pengambilan keputusan di wilayahnya.

### *Ketimpangan Gender dan Ekonomi yang Dialami Perempuan Pesisir di Jakarta*

Ketimpangan gender dan ekonomi yang dialami perempuan pesisir di Jakarta juga terjadi akibat reklamasi pantai. Reklamasi pantai berkontribusi terhadap ketimpangan gender dan ekonomi yang dialami perempuan di Jakarta dalam beberapa hal.

Pertama, reklamasi pantai mengakibatkan tergusurnya masyarakat rentan, terutama yang berasal dari rumah tangga berpendapatan rendah, termasuk perempuan dan anak-anak. Daerah pesisir yang direklamasi di Jakarta peruntukannya dikembangkan menjadi properti perumahan atau komersial kelas atas, yang tidak terjangkau oleh banyak penduduk di daerah tersebut. Hal ini dapat menyebabkan pengusuran paksa dan hilangnya rumah dan mata pencaharian, yang secara tidak proporsional mempengaruhi masyarakat yang terpinggirkan.

Kedua, reklamasi pantai menimbulkan dampak lingkungan yang negatif, seperti rusaknya terumbu karang dan mangrove. Lingkungan ini memainkan peran penting dalam mendukung komunitas nelayan skala kecil yang mengandalkan sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka, sebuah sektor di mana perempuan memainkan peran penting sebagai pedagang ikan. Dengan hilangnya sumber daya alam ini, peluang ekonomi perempuan dapat berkurang, menyebabkan hilangnya pendapatan dan meningkatnya kemiskinan.

Selain itu, reklamasi pantai juga dapat mengganggu peran gender tradisional dan meningkatkan kekerasan berbasis gender. Perempuan di masyarakat pesisir secara tradisional melakukan peran rumah tangga dan perawatan serta bertanggung jawab mengelola mata pencaharian rumah tangga, termasuk kegiatan menjual hingga mengolah ikan. Dengan hilangnya daerah penangkapan ikan tradisional dan terganggunya jaringan pendukung mereka, sehingga perempuan terpaksa mencari sumber pendapatan alternatif, yang menyebabkan perempuan menempuh jam kerja yang lebih panjang.

”

### **Kotak 5. Cerita perempuan pengupas kerang dari Kelurahan Muara Angke**

“Saya tinggal di pesisir Jakarta yang sebelumnya adalah pemukiman nelayan. Tapi sejak ada proyek reklamasi kawasan pesisir, hidup kami makin sulit. Perahu yang biasa dipakai untuk melaut, kehalang konstruksi reklamasi. Jadi harus ambil jalur lebih panjang dan pasti minyaknya juga lebih banyak. Kerang ijo yang biasa dapanen juga jadi makin sedikit dan makin kecil. Makin susah dikupas dan kadang sampai luka ini jari. Pokoknya susah deh, mau kasih jajan anak juga jadi susah. Mau bayaran sekolah juga susah.”

#### *Kesimpulan*

Ketimpangan ekonomi yang signifikan antar kota di wilayah Jabotabek, dengan Jakarta sebagai kota yang paling tinggi pendapatannya terjadi. Pandemi Covid-19 memperburuk ketimpangan gender dan ekonomi yang dialami perempuan di Jakarta, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan bergaji rendah. Selain itu, privatisasi air juga memperparah ketimpangan, menyebabkan kesulitan dalam mengakses air bersih dan berdampak negatif terhadap sumber kehidupan perempuan. Terlebih perempuan pesisir yang mengalami dampak akibat pembangunan reklamasi pesisir. Hal ini juga berkontribusi pada ketidaksetaraan gender dan ekonomi, yang menyebabkan perpindahan, hilangnya mata pencaharian tradisional, dan distorsi peran gender. Pembuat kebijakan harus menyadari dampak khusus gender ini dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak perempuan dan mendukung kesejahteraan ekonomi mereka.



SULAWESI  
TENGAH



## Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah

### *Latar Belakang*

Sebagian besar penduduk miskin di Sulawesi Tengah tinggal di pedesaan dan merupakan petani yang menggantungkan mata pencahariannya pada pertanian. Para petani ini sering menghadapi tantangan seperti akses modal yang terbatas, input pertanian, dan sistem irigasi. Mereka mungkin juga menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar di mana mereka dapat menjual produk mereka dengan harga yang layak.

Selain itu, juga ada persoalan terkait dengan kurangnya akses terhadap fasilitas dan layanan esensial seperti air bersih, sanitasi, hingga layanan kesehatan. Salah satu faktornya adalah lokasi rumah yang terpencil. Kurangnya akses tersebut berpotensi menghasilkan kondisi kesehatan yang buruk seperti gizi buruk hingga melanggar kemiskinan. Seperti halnya dengan akses terhadap pendidikan. Keluarga miskin di Sulawesi Tengah kesulitan untuk membayar biaya pendidikan dasar, bahkan di beberapa kasus lebih memprioritaskan kebutuhan dasar lainnya daripada pendidikan untuk anak-anaknya.

Sebelum krisis pandemi COVID-19, pada tahun 2018 terjadi bencana alam yang mencakup gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang sangat berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi dan gender di wilayah Sulawesi Tengah. Gempa magnitudo 7,5 melanda wilayah tersebut pada 28 September 2018, dan berpusat di Kabupaten Donggala, sekitar 27 km dari kota Palu. Gempa tersebut memicu tsunami yang memporak-porandakan wilayah pesisir dan menyebabkan likuifaksi di kawasan Teluk Palu yang menghancurkan beberapa lingkungan dan permukiman. Palu, ibu kota Sulawesi Tengah, dilanda gempa bumi dan tsunami yang parah, dengan banyak bangunan runtuh atau mengalami kerusakan parah. Kelurahan Balaroa dan Petobo di Palu sangat terpengaruh oleh likuifaksi yang terjadi akibat destabilisasi pasir dan tanah. Sementara itu, banyak warga di Kabupaten Sigi dan Donggala yang tinggal

di desa-desa terpencil juga mengalami kerusakan rumah dan infrastruktur yang parah. Bencana tersebut menyebabkan banyak korban jiwa, dengan lebih dari 4.300 orang kehilangan nyawa dan ribuan lainnya mengungsi dari rumah mereka akibat dampak gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Selain itu, bencana tersebut menyebabkan kehancuran besar-besaran terhadap rumah, bangunan, infrastruktur, serta mengganggu layanan dasar dan akses kesehatan di daerah tersebut.<sup>5</sup> Bencana yang terjadi berdampak lebih berat dan mendalam bagi kelompok masyarakat yang termarginalisasi, termasuk diantaranya perempuan, anak, dan kelompok lansia yang seringkali merupakan kelompok yang rentan di masa krisis.

#### *Dampak Ketimpangan Ekstrem yang Dirasakan oleh Perempuan di Sulawesi Tengah*

Setelah bencana, perempuan menghadapi tantangan yang signifikan termasuk akses yang terbatas pada layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi yang memadai. Banyak perempuan yang kehilangan rumah, harta benda dan sumber pendapatan yang meningkatkan kerentanan dan memperlebar jurang kesenjangan kesejahteraan. Bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 berdampak khusus pada perempuan, yang semakin memperparah kesenjangan gender dan ekonomi di wilayah tersebut.

Pasca bencana, perempuan menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk akses terbatas ke layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang memadai. Banyak perempuan juga kehilangan rumah, harta benda, dan sumber pendapatan, yang meningkatkan kerentanan dan ketergantungan mereka kepada orang lain. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa perempuan terkena dampak bencana alam secara lebih berat dan mendalam karena ketimpangan sosial ekonomi yang mengakar. Perempuan cenderung menghadapi peningkatan risiko kekerasan, pelecehan, dan pelecehan seksual dalam situasi bencana, yang hanya memperburuk kondisi ketimpangan yang ada.

---

<sup>5</sup> BBC News. Indonesia earthquake Hundreds dead in Palu, Tsunami. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-45652460>

Selain itu, perempuan di Sulawesi Tengah cenderung bekerja di pekerjaan informal berupa rendah di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pedagang, dan buruh tani. Pekerjaan ini seringkali kurang stabil dan memiliki perlindungan sosial yang terbatas dibandingkan pekerjaan formal, membuat perempuan lebih rentan terhadap guncangan ekonomi, termasuk keadaan darurat publik seperti bencana alam. Hilangnya mata pencaharian akibat bencana, oleh karena itu, terutama menimpa perempuan dan keluarganya.



Situasi setelah bencana likuifaksi di Palu. Foto oleh Ungkeito, CC BY-SA 4.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons

Dampak signifikan lain dari bencana terhadap perempuan adalah peran mereka sebagai pengasuh, baik selama maupun setelah krisis. Perempuan di Sulawesi Tengah memainkan peran penting dalam keluarga mereka, termasuk mengasuh anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Tanggung jawab tambahan untuk pengasuhan ini dapat mengganggu kemampuan mereka untuk mencari pekerjaan dan berpartisipasi dalam upaya bantuan dan rehabilitasi yang vital.

*Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di wilayah Sulawesi Tengah secara Umum*

Berdasarkan hasil konsultasi wilayah yang dilakukan oleh SP

Palu, yang melibatkan 118 perempuan dari 6 Desa (Desa Lero, Desa Toaya, Desa Langaleso, Desa Pakuli, Desa Watutau, dan Desa Kaduwaa), ditemukan persoalan yang ketimpangan ekonomi dan gender yang menyebabkan kemiskinan bagi perempuan. Termasuk cara pandang yang menempatkan perempuan sebagai objek dalam setiap pengambilan keputusan, perannya selalu ditempatkan pada posisi kedua di semua ranah, sehingga perempuan seringkali tidak mendapatkan informasi, dan tidak dimintai persetujuan ketika akan dibangun proyek. Dampaknya perempuan mengalami keterbatasan dalam mengakses sumber-sumber pangan dan hutan, keterbatasan mengelola tanah pertaniannya, perempuan kemudian beralih profesi menjadi buruh, dan ketika menjadi buruh mengalami diskriminasi upah, serta perempuan memilih bekerja ke luar negeri yang minim perlindungan. Beberapa hal yang diungkapkan dalam konsultasi tersebut antara lain adalah:

*Keterbatasan akses tanah dan hutan*, yakni keterbatasan akses perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan terhadap tanah dan sumber daya hutan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Perempuan di Sulawesi Tengah memiliki koneksi dengan hutan, yang menjadi tempat untuk hidup, sumber pangan, bahkan ruang spiritual, ruang sosial dan ruang aman untuk keberlangsungan hidup. Akan tetapi saat ini hutan dijadikan sebagai komoditi oleh negara, dan melalui kebijakan penetapan kawasan Taman Nasional hingga perempuan adat yang selama ini hidup didalamnya terusir dari hutan.

Selain itu, persoalan juga dialami oleh masyarakat transmigrasi dari Jawa dan Bali yang oleh pemerintah ditempatkan berbatasan dengan kawasan Taman Nasional. Adapun tanah yang diberikan untuk bertani adalah tanah tandus yang tidak dapat diolah, sehingga masyarakat terpaksa mengelola tanah di dalam kawasan hutan. Pada tahun 2004 sebanyak 189 kepala keluarga dari masyarakat transmigrasi mendapatkan izin pengelolaan dari Balai Taman Nasional Lore Lindu, akan tetapi izin tersebut menjadi permasalahan panjang. Hingga saat ini masyarakat (laki-laki dan perempuan) mendapatkan intimidasi dan kriminalisasi dalam mengelola tanah. Dari berbagai situasi ini semakin perempuan merasakan ketimpangan informasi, pengetahuan, akses tanah, lahan, hutan, pendidikan.



### **Kotak 6. Cerita Perempuan dari Desa Siliwanga**

*“Saat ini perempuan masih terus mengalami ketakutan pada saat mengelola pertanian di dalam kawasan hutan, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan dukungan pemerintah sangat penting, untuk memberikan keamanan bagi perempuan yang mengelola tanah di dalam kawasan hutan.”*

#### *Keterbatasan akses terhadap alat produksi pertanian*

Pengelolaan pertanian di Sulawesi Tengah berubah menjadi sistem pertanian modern, yakni dengan menggunakan alat-alat modern seperti traktor yang menjadi tenaga penggerak, alat pengolah tanah, alat tanam, alat pemupukan dan pengendalian hama, irigasi ataupun pengairan serta input kimia. Sistem pertanian modern ini secara perlahan merugikan perempuan karena tidak dapat diakses oleh perempuan akibat mahal. Kemudian, pengetahuan perempuan dalam mengelola pertanian dengan cara tradisional semakin hilang. Salah satunya adalah perempuan tidak dapat lagi menggunakan pola rotasi tanam, hilangnya pengetahuan tanam dengan menggunakan kalender perbintangan, hilangnya pengetahuan tentang pengolahan pupuk alami, hilangnya pengetahuan tentang pemuliaan benih dan terancam kehilangan benih-benih lokal. Maka yang terjadi adalah perempuan mengalami ketergantungan terhadap input kimia dan benih hibrida. Sementara input-input pertanian tersebut terus meningkat harganya, penghasilan petani khususnya perempuan terus berkurang dan harus mencari sumber penghasilan yang lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan anak-anak bersekolah. Selain itu juga ada persoalan subsidi dari pemerintah yang tidak tepat sasaran, yang diperparah dengan sistem pendataan yang berlaku di desa masih menggunakan pendekatan relasi bagi yang memiliki akses dan kuasa, misalnya sasarannya adalah keluarga terdekat kepala desa.

#### *Keterbatasan akses terhadap modal untuk pendanaan usaha kecil*

Keterbatasan akses terhadap permodalan untuk UMKM juga

menjadi persoalan bagi perempuan-perempuan yang ada di desa. Persoalannya pun beragam, sebagai contoh untuk UMKM Mekar yang beranggotakan mantan buruh migran di Kabupaten Sigi telah mendapatkan modal sebesar Rp. 2.000.000 yang digunakan untuk modal usaha. Akan tetapi setiap minggu harus membayar Rp. 50.000 sementara pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk kebutuhan dasarnya. Selain itu program UMKM tidak benar-benar sampai informasinya ke perempuan manfaat dan kerugiannya, tanpa ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga perempuan tidak mengetahui penggunaan dan pengelolaan dana UMKM tersebut.

”

#### **Kotak 7. Cerita perempuan dari Desa Pakuli**

*“Ini juga kalau saya lihat mantan perempuan buruh migran yang meminjam dana UMKM tanpa ada usaha yang dibuat sehingga perempuan yang meminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman akibatnya mereka menjual barang-barang rumah yang bisa dijual untuk membayar bunga pinjaman dan ada yang berangkat kembali menjadi buruh migran di Timur tengah”*



Konsultasi wilayah di Palu. Foto oleh Solidaritas Perempuan Palu.

*Persoalan pelindungan perempuan buruh migran. SP Palu menemukan terjadi peningkatan pemberangkatan buruh*

migran dari Sulawesi Tengah pada tahun 2021. Di bulan Oktober terdapat 40 orang yang bekerja ke luar negeri, tahun 2022 per bulan November ada 170 orang yang ditempatkan bekerja ke luar negeri, dan sebagian besar bertujuan ke Timur Tengah. Hal ini disebabkan karena latar belakang agama yang mayoritas adalah agama Islam sehingga dianggap lebih mudah untuk beradaptasi. Salah satu faktor yang mendorong perempuan bekerja di luar negeri adalah lahan pertanian tidak produktif karena mengalami kekeringan, hilangnya lahan pertanian karena bencana alam, sehingga tidak memiliki sumber mata pencaharian, dan kemudian terjerat hutang, serta kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang memilih bekerja keluar negeri ini justru terjebak pada pola migrasi tidak aman, selain perempuan menjadi target para calo, perempuan juga kurang menerima akses informasi dan pengetahuan terkait dengan perekutan dan penempatan yang aman.

#### *Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di wilayah Kabupaten Poso*

Selain di wilayah Sulawesi Tengah secara umum, konsultasi wilayah juga dilakukan di Kabupaten Poso. Sebanyak 19 orang perempuan dari desa Kuku, Saojo dan Tampemadoro terlibat mendiskusikan tentang situasi ketimpangan ekonomi dan gender di wilayah Kabupaten Poso. Beberapa fakta yang disampaikan oleh perempuan dari wilayah Poso antara lain terkait dengan:

*Perampasan tanah oleh perusahaan sawit.* Perluasan perkebunan sawit di Kabupaten Poso seringkali dilakukan melalui perampasan tanah tanpa menerapkan *Free, Prior, Informed Consent* dari masyarakat setempat yang kemudian berdampak luas terhadap lingkungan dan sumber kehidupan masyarakat. Salah satu pelakunya adalah PT Sawit Jaya Abadi yang wilayah operasionalnya mencakup desa Barati Pamona Utara telah merusak hutan dan menyebabkan erosi. Hingga akhirnya terjadi banjir yang menggenangi perkebunan milik warga. PT Sawit Jaya Abadi adalah salah satu perusahaan sawit yang dilaporkan melakukan banyak pelanggaran lingkungan dan terlibat dalam konflik agraria yang muncul akibat perampasan tanah dengan menggunakan kekerasan dan

intimidasi terhadap masyarakat setempat. Perampasan tanah untuk perkebunan sawit seringkali menimbulkan kesulitan hidup bagi perempuan, khususnya yang bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hilangnya tanah bagi perempuan artinya tergesur dari sumber kehidupannya, antara lain sumber pangan, sumber air, sumber obat-obatan dan lain sebagainya. Hal ini yang kemudian menjadikan perempuan terjerat dalam jebakan pemiskinan. Akibat budaya patriarki yang tidak menempatkan perempuan sebagai subjek pengambilan keputusan di keluarga hingga komunitasnya, perempuan tidak mendapatkan informasi, tidak terlibat dalam rapat-rapat pengambilan keputusan, dan tidak dapat mendorong kepentingannya dalam suatu keputusan.

”

#### **Kotak 8. Cerita perempuan petani dari desa Saojo**

*“Kurangnya informasi dan sosialisasi seperti kami yang di Saojo masalah penjualan tanah atau harga tanah karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa atau musyawarah desa, kami masyarakat biasa kurang dilibatkan apalagi kurangnya sosialisasi harga tanah dan perusahaan yang mengambil tanah di desa kami, malah ketika sudah digusur baru ada petugas perusahaan yang datang mengatakan tanahnya mau diambil karena sudah terlanjur di gusur karena kita sebagai masyarakat istilah masih awam dalam berfikir buat apalagi kalau sudah digusur mau tidak mau tinggal pasrah jual saja daripada tidak dapat sama sekali”.*



Konsultasi Wilayah di Kabupaten Poso. Foto oleh Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso

Keterbatasan akses terhadap alat dan produksi pertanian. Perempuan petani juga mengalami persoalan akan ketergantungannya terhadap benih hibrida yang didoktrin oleh pemerintah sebagai benih unggul. Demikian juga pupuk kimia, yang selain mahal juga semakin langka. Padahal masyarakat sudah sedemikian rupa dibuat tergantung pada pupuk kimia. Hal ini mengakibatkan biaya produksi yang sangat tinggi sementara hasil panen tidak menentu. Akibatnya keluarga petani sulit untuk membiayai kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, pendidikan anak, biaya kesehatan dan lain sebagainya. Perempuan yang memiliki peran sebagai pengelola keuangan keluarga pun mesti bekerja serabutan untuk mendapatkan tambahan uang demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

“

#### Kotak 9. Cerita Perempuan dari Desa Kuku

Kami sebagai petani jagung merasakan masalah ketergantungan pada benih dan pupuk mahal, contoh “untuk menanam jagung lebih besar modal dari pada hasil panennya. Rincian modal biayanya Rp 1.000.000 digunakan untuk pembelian 5 kilo bibit dengan harga Rp 500.000 dan pupuk Rp 500.000, dengan modal ini dapat menghasilkan 1 ton jagung. Setelah panen masalah lainnya berkaitan dengan harga yang berubah-ubah. Sehingga petani jarang kembali modal apalagi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya

*Pembangunan proyek energi bersih yang menimbulkan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi di Poso.* Untuk kepentingan listrik bagi industri, ratusan hektar wilayah adat masyarakat Danau Poso akan rusak dan bahkan tenggelam akibat mega proyek PLTA Poso yang berkapasitas 515 MW. Hingga saat ini, sejumlah persoalan muncul seperti perampasan tanah, kerusakan lingkungan dan kemiskinan. Danau Poso, sebagai identitas dan sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya telah menjadi tulang punggung perekonomian warga selama ini. Lahan pertanian seperti sawah dan kebun di pinggiran danau, pengelolaannya mengikuti siklus air dari Danau Poso. Tak hanya itu, ada juga nelayan tradisional dan penambang pasir tradisional yang menjadikan Danau Poso sebagai sumber mata pencaharian. Dengan mengatasnamakan EBT, melalui proyek ini pemerintah berdalih mengupayakan menjaga lingkungan dengan meninggalkan batubara. Nyatanya PLTA Poso yang selama ini sudah berjalan telah mengganggu ekologi, bahkan menyebabkan hilangnya endemik ikan yang berada di sungai Poso. Pun mengancam keberlangsungan kehidupan ribuan masyarakat adat yang tinggal di sekitar Danau Poso. Ironi apabila menyebut penenggelaman wilayah adat Danau Poso ialah untuk mengejar perkembangan EBT, tanpa memikirkan jauh resikonya terhadap masyarakat Danau Poso.<sup>6</sup>

*Pengaruh Terorisme dan Konflik Sektarian* cukup signifikan terhadap ketimpangan ekonomi dan gender di Poso. Konflik dan kekerasan telah menimbulkan ketakutan bagi warga Poso, terlebih saat konflik terjadi sebagian besar masyarakat mengalihkan perhatian dari usaha ekonomi mereka. Meskipun dimulai sejak tahun 1998, namun masyarakat masih banyak yang hidup dalam ketakutan akibat konflik sektarian yang antara Muslim dan Kristen yang menewaskan lebih dari 1.000 orang antara tahun 1998 dan 2021. Khususnya masyarakat yang hidup di Lembah Lore, sebuah wilayah yang banyak menghasilkan kakao, kopi, vanili dan tanaman lainnya. Meskipun telah ada

<sup>6</sup> Wahana Lingkungan Hidup. Pernyataan Sikap Bersama: Presiden Jokowi meresmikan PLTA Poso di tengah Derita Berkepanjangan Warga. Maret 2022. Diakses dari <https://www.walhi.or.id/presiden-jokowi-meresmikan-plta-poso-di-tengah-derita-berkepanjangan-warga>

kesepakatan damai yang mengakhiri konflik tersebut, tetapi militan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) terus beroperasi di daerah-daerah terpencil. Selama bertahun-tahun mereka hidup dalam ketakutan atas ancaman kelompok militan bersenjata yang telah bersumpah setia kepada kelompok Negara Islam dan melakukan serangan mematikan terhadap warga sipil dan aparat keamanan di Poso dan sekitarnya. Teror tersebut menjadikan masyarakat takut untuk pergi berkebun sehingga menurunkan produktivitas pertanian. Akibatnya konflik Poso menghasilkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar daripada sebelum konflik terjadi, dengan masyarakat yang lebih miskin biasanya menderita lebih banyak.

### *Kesimpulan*

Situasi bencana dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan gender yang dihadapi oleh masyarakat seperti yang terjadi di wilayah Palu dan sekitarnya. Hal tersebut menjadikan lebih sulit bagi kelompok yang termarginalkan untuk dapat pulih dan dapat pula meningkatkan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Perempuan, anak-anak, dan kelompok lanjut usia serta mereka yang miskin dan etnis minoritas cenderung mengalami dampak yang berbeda dari bencana. Sebab mereka lebih sedikit memiliki akses terhadap sumber daya dan seringkali terkecualikan dari proses pengambilan keputusan. Bencana juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi struktural, seperti akses yang tidak merata terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan peluang kerja.

Selain itu, terdapat hubungan yang kompleks antara terorisme dengan ketimpangan gender dan ekonomi. Meskipun bukan hubungan kausalitas langsung, tapi ketimpangan gender dan ekonomi dapat berperan sebagai faktor penyebab munculnya dan penyebaran kegiatan teroris. Sebaliknya, aksi teroris juga menimbulkan ketakutan yang semakin mempertajam ketimpangan ekonomi dan gender.

Ketimpangan ekonomi dapat menciptakan kondisi yang menjadikan individu, khususnya kelompok muda, lebih rentan terhadap radikal化asi dan rekrutmen kelompok teroris. Mereka yang hidup dalam kemiskinan atau sedikit mendapatkan



ACEH

peluang ekonomi akan lebih terbuka terhadap ideologi dan kelompok fundamentalisme keagamaan yang berusaha mengkambinghitamkan kelompok minoritas atas tantangan ekonomi yang dihadapi. Ketimpangan gender juga dapat berperan dalam terorisme, khususnya pada konteks dimana perempuan termarginalkan dan dikecualikan dari peluang ekonomi dan politik.

## Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Provinsi Aceh

### *Latar Belakang*

Provinsi Aceh menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal ketimpangan gender dan ekonomi, sebagian karena sejarah konflik maupun bencana alamnya. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, Aceh memiliki tingkat kemiskinan sebesar 14,4% pada tahun 2020, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 9,9%. Selain kemiskinan, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan di wilayah tersebut, yang semakin memperburuk ketimpangan ekonomi. Perekonomian Aceh ditopang oleh sumber daya alamnya, khususnya sektor pertanian dan perikanan. Namun, sektor-sektor ini rentan terhadap guncangan lingkungan seperti gempa bumi dan tsunami, serta perubahan pola iklim. Selain itu, pertumbuhan industri minyak dan gas di wilayah tersebut tidak selalu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal, dan ada kekhawatiran akan degradasi lingkungan dan dampak sosial.

Konflik di Aceh yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan berakhir pada tahun 2005 berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah dan berkontribusi pada ketimpangan ekonomi. Konflik tersebut mengganggu kegiatan ekonomi, merusak infrastruktur, masyarakat mengungsi, serta menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Pemerintah Indonesia yang memberlakukan kehadiran militer di wilayah tersebut, yang menghambat pembangunan ekonomi dan berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia, termasuk

hak perempuan.<sup>7</sup> Dampak konflik terhadap ekonomi sangat akut di daerah pedesaan, di mana banyak orang bergantung pada pertanian dan perikanan untuk mata pencaharian mereka. Di daerah-daerah tersebut, konflik menyebabkan berkurangnya produksi dan pendapatan, serta pemindahan dan hilangnya aset. Perempuan khususnya terkena dampak konflik, karena mereka memiliki kesempatan kerja yang terbatas dan menghadapi risiko kekerasan dan eksloitasi. Konflik juga berdampak pada distribusi kekayaan dan sumber daya di Aceh. Menurut beberapa laporan, pemilik tanah yang lebih kaya dan kepentingan bisnis dapat memanfaatkan konflik untuk memajukan kepentingan mereka sendiri, sementara komunitas yang lebih miskin tertinggal.<sup>8</sup> Selain itu, alokasi bantuan dan dana rekonstruksi pasca konflik juga berkontribusi pada ketimpangan ekonomi, karena beberapa komunitas menerima lebih banyak bantuan daripada yang lain.

Tak hanya konflik, bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 2004 juga mempengaruhi ketimpangan gender dan ekonomi di Aceh. Tsunami memperburuk ketimpangan gender dan ekonomi di Aceh, tak hanya dampak kerusakan yang dihasilkan tapi juga dampak yang berbeda pada segmen populasi yang berbeda juga. Ada sekelompok orang yang dapat menggunakan bantuan untuk membangun kembali kehidupannya. Namun, di sisi lainnya sebagian orang menghadapi tantangan ekonomi yang terus berlanjut, khususnya di daerah pedesaan yang terkena dampak parah akibat bencana tersebut.

#### *Dampak Ketimpangan Ekstrem yang Dirasakan oleh Perempuan di Aceh*

Keistimewaan di Aceh untuk menerapkan hukum syari'ah diberikan pasca perjanjian perdamaian di tahun 2005 untuk mengakhiri konflik. Penerapan hukum syari'ah ini mempengaruhi secara signifikan dampak atas norma sosial, kerangka hukum

---

<sup>7</sup> Fuadi Mardhatillah. Refleksi 17 tahun darurat militer merawat ingatan dampak kekerasan di Aceh. 20 Mei 2020. Diakses dari <https://kontrasaceh.or.id/refleksi-17-tahun-darurat-militer-merawat-ingatan-dampak-kekerasan-di-aceh/>

<sup>8</sup> Edward Aspinall, M.C. Ricklefs, and Anthony Reid. *The Political Economy of Aceh and Its Conflict*. Published by NUS Press in 2011

dan hak-hak perempuan di Aceh. Salah satu dampak yang paling penting adalah pembatasan hak dan kebebasan perempuan. Misalnya bagaimana pemberlakuan aturan berpakaian dan pembatasan mobilitas perempuan menjadi justifikasi diskriminasi terhadap perempuan dan membatasi ruang serta kemampuan perempuan untuk dapat menjadi subyek pembangunan. Aturan berpakaian dan pembatasan mobilitas perempuan telah memperkuat norma gender dan dinamika kekuasaan yang mengutamakan dominasi dan kontrol laki-laki atas tubuh perempuan.

Salah satu dampak utama penerapan hukum Syariah adalah pembatasan hak dan kebebasan perempuan. Beberapa aspek hukum Syariah, seperti pemberlakuan aturan berpakaian dan pembatasan mobilitas perempuan, telah digunakan untuk menjustifikasi diskriminasi terhadap perempuan dan membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Perempuan di Aceh kini tunduk pada aturan berpakaian yang lebih ketat dan diharuskan mengenakan jilbab di ruang publik. Hal ini memperkuat norma gender dan dinamika kekuasaan yang mengutamakan dominasi dan kontrol laki-laki atas tubuh perempuan.



*Hukuman cambuk di depan umum sebagai hukuman pidana yang dipraktikkan di provinsi Aceh. Foto oleh Getty Images*

Selain itu, perekonomian Aceh yang sangat tergantung pada ekstraksi sumber daya alam juga membawa dampak yang signifikan terhadap ketimpangan gender dan ekonomi. Hal tersebut karena ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya alam, pengelolaan dan distribusi akses terhadap sumber daya juga berkontribusi terhadap ketimpangan dalam hal kesejahteraan dan peluang bagi kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Sehingga salah satu dampak yang paling nyata adalah konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada pihak tertentu. Perempuan di Aceh sebagian besarnya mempraktikkan pertanian dan pengelolaan perikanan yang subsisten, sehingga bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupannya. Namun eksplorasi sumber daya alam tersebut menghasilkan kerusakan lingkungan dan disruptsi atas ekonomi lokal yang berdampak berbeda terhadap perempuan. Terlebih perempuan seringkali dikecualikan dari proses pengambilan keputusan.

*Situasi Ketimpangan Ekonomi dan Gender di Wilayah Aceh*  
Solidaritas Perempuan Aceh melibatkan 43 perempuan untuk mendiskusikan ketimpangan ekonomi dan gender yang mereka alami, antara lain adalah:

*Kebijakan diskriminatif* yang mengontrol tubuh, pikiran, ruang gerak hingga hasil kerja perempuan dari budaya patriarki yang diinstitusionalisasikan melalui regulasi/aturan Negara. Kontrol ini menjadi faktor penghalang bagi perempuan di Aceh untuk terlibat dalam ruang-ruang publik. Misalnya, meskipun perempuan menjadi bagian dari lembaga musyawarah desa, namun tetap dibatasi waktunya keluar rumah. Sehingga apabila rapat pengambilan keputusan berlarut-larut waktunya, maka perwakilan perempuan tidak dibolehkan untuk mengikuti sampai akhir. Termasuk juga terbatasnya hak perempuan Aceh atas kepemilikan aset yang dapat membatasi perempuan untuk mengakses kredit atau menjadikan perempuan rentan akan kehilangan rumah ataupun tanahnya jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal dunia.

*Diskriminasi dalam alokasi sumber daya* yang disebabkan oleh kebijakan diskriminatif dan dikecualikannya perempuan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga bisa terjadi karena

kurangnya kepedulian akan kebutuhan spesifik perempuan. Perempuan juga merasakan kurangnya akses terhadap sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk bangkit dari konflik maupun bencana yang terjadi. Termasuk apabila terjadi kerusakan lingkungan yang mengganggu sumber kehidupannya.

*Kerusakan lingkungan akibat eksplorasi maupun upaya pemulihannya* juga dirasakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang berbeda bagi perempuan. Sebagai contoh, salah satu proyek yang digadang-gadang sebagai salah satu upaya untuk rekonstruksi tsunami, yakni proyek pembangunan pabrik semen telah menimbulkan pencemaran lingkungan sekaligus merusak karst sebagai cadangan air masyarakat di Aceh. Perempuan di gampong pun mengalami krisis air, yang dengan peran gendernya tentu akan berdampak lebih berat dan mendalam.



Konsultasi Wilayah di Aceh. Foto Dokumentasi Solidaritas  
Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh.

### *Kesimpulan*

Perempuan di Aceh menghadapi berbagai hambatan untuk mencapai keadilan ekonomi, termasuk budaya patriarki, kebijakan dan praktik diskriminatif, akses pendidikan dan peningkatan kapasitas yang terbatas, serta kurangnya akses terhadap sumber daya finansial seperti permodalan.



JANGAN AMBIL  
LAHAN KAMI

SUMATERA  
SELATAN



Ketimpangan ekonomi yang dialami oleh perempuan di Aceh menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang luas, berkontribusi terhadap kemiskinan dan membatasi pembangunan ekonomi yang mendistribusikan kesejahteraan secara adil. Sehingga untuk mengatasinya diperlukan pendekatan multi aspek yang mengatasi akar penyebab ketimpangan di Aceh, yang mencakup perubahan hukum dan kebijakan serta menggeser budaya untuk meruntuhkan stereotip dan tradisi gender yang mengontrol tubuh, pikiran, ruang gerak, hasil kerja dan keputusan perempuan.

## Situasi Ketimpangan Gender dan Ekonomi di Sumatera Selatan

### *Latar Belakang*

Kemiskinan di Sumatera Selatan lebih banyak terjadi di pedesaan, beberapa faktor diantaranya adalah upah rendah, kurangnya akses terhadap hak-hak dasar yang esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta kesempatan kerja yang memadai. Selain itu, bencana alam seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor dapat memperparah kemiskinan di wilayah tersebut. Ketimpangan ekonomi juga terjadi antara wilayah pedesaan dengan perkotaan, dimana terjadi distribusi sumber daya dan peluang yang berbeda. Di wilayah perkotaan pada umumnya memiliki akses terhadap layanan mendasar seperti pendidikan dan kesehatan yang lebih baik ketimbang di desa. Hal ini menghasilkan kesenjangan dalam penghasilan maupun standar hidup.

Di pedesaan, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan isu yang saling terkait yang dapat menimbulkan konflik agraria di Sumatera Selatan. Konflik agraria seringkali muncul karena ketimpangan ekonomi, dimana masyarakat yang terpinggirkan cenderung kehilangan tanah dan mata pencahariannya karena aktor yang lebih kuat dan kaya seperti perusahaan atau pemerintah. Masyarakat ini diusir begitu saja dan tidak diberikan kompensasi yang hingga akhirnya menghasilkan kesulitan

ekonomi dan kemiskinan yang berkelanjutan. Pada umumnya masyarakat di desa tidak memiliki sumber daya atau kekuatan politik untuk mengamankan hak atas tanah atau membela diri terhadap penguasaan oleh aktor yang lebih berkuasa yang menyebabkan perselisihan dan konflik.

Konflik agraria atau konflik tanah merupakan persoalan yang lama terjadi di Sumatera Selatan, yang melibatkan konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan yang mengklaim kepemilikan atau penguasaan tanah. Konflik ini di Sumatera Selatan seringkali muncul karena perampasan tanah untuk keperluan industri perkebunan, pertambangan atau penebangan kayu. Pada banyak kasus, masyarakat setempat terpaksa menyerahkan tanah akibat intimidasi dan kekerasan yang dilakukan untuk menghindari kompensasi yang memadai atau konsultasi yang layak.

#### *Dampak Ketimpangan yang Dirasakan oleh Perempuan di Sumatera Selatan*

Hidup di wilayah agraris, perempuan di Sumatera Selatan masih mengalami tantangan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, air, kredit dan input pertanian lainnya yang membatasi kapasitasnya dalam meningkatkan produksi pangan. Keharusan menggunakan pupuk kimia dan benih hibrida juga menjadikan keluarga petani mengeluarkan biaya produksi yang tinggi, sekaligus secara khusus berdampak terhadap kesehatan reproduksi perempuan.



Konsultasi wilayah di Sumatera Selatan. Foto Dokumentasi Solidaritas Perempuan Palembang

Selain itu, tanggung jawab domestik perempuan dalam melakukan kerja-kerja perawatan keluarga yang tak berbayar menambah durasi waktu yang dihabiskan menjadikan perempuan mengalami beban berlapis dan membatasi kapasitas perempuan untuk terlibat dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.

Solidaritas Perempuan Palembang melakukan konsultasi wilayah yang melibatkan setidaknya 33 perempuan mendiskusikan situasi ketimpangan gender dan ekonomi yang dialami dalam kesehariannya. Beberapa situasi yang disampaikan antara lain adalah:

*Keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan peluang kerja, khususnya bagi perempuan di pedesaan.* Perempuan di Sumatera Selatan di pedesaan memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan yang pada akhirnya membatasi peluang mereka pada bidang pekerjaan yang lebih beragam. Ataupun juga membatasi perempuan untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan aktivitas ekonominya, seperti bertani atau budidaya perikanan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh perempuan di Sumatera Selatan dalam mengakses layanan kesehatan adalah terkait dengan jarak tempuh. Khususnya di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kesehatan sehingga perempuan sulit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Hal ini berpengaruh terhadap aksesibilitas layanan kesehatan menjadi sangat sulit. Pada proses konsultasi wilayah yang dilakukan, perempuan yang terlibat menyatakan bahwa mereka baru akan mendatangi pusat layanan kesehatan seperti rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) apabila kondisinya sudah sangat parah dan tidak dapat beraktivitas. Mereka cenderung akan menahan atau mengabaikan gejala gangguan kesehatan yang dirasakan karena beban rumah tangga tertumpu pada perempuan. Akibatnya perempuan tidak terbiasa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, termasuk kesehatan reproduksinya yang dapat mencegah tingkat keparahan dari penyakit yang mungkin dideritanya.

”

#### **Kotak 10. Cerita perempuan petani dari desa Tanjung Pinang**

*“Saya merasa sangat berat ketika mengalami sakit parah karena beban kerjaan di rumah jadi gak keurus. Sebagai ibu rumah tangga, saya harus siapkan makanan untuk keluarga, ngurus anak, pergi ke ladang, cuci baju, termasuk juga bersih-bersih. Tapi kalau saya sakit, gak ada yang bisa ngerjain kerjaan rumah sama sekali. Saya juga merasa bersalah karena gak bisa ngerjain kerjaan seperti biasa. Menjadi perempuan emang gak boleh sakit.”*

*Keterbatasan akses dan kontrol perempuan atas sumber daya produktif.* Perempuan di Sumatera Selatan masih mengalami diskriminasi dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya produktif seperti tanah. Terdapat ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah. Umumnya, laki-laki memegang peran dominan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah sehingga perempuan seringkali tidak memiliki hak yang setara dalam hal ini. Situasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor budaya patriarki. Situasi ini juga diperparah dengan konflik agraria yang berkepanjangan. Meskipun perempuan seringkali di garis depan perjuangan mempertahankan tanahnya, namun ketika berhasil direbut kembali maka belum serta merta akan mengakui hak perempuan atas tanahnya. Tak hanya tanah, tapi juga alat dan produksi pertanian yang teknologinya tidak ramah bagi perempuan. Hal ini juga menjadi persoalan bagi perempuan dalam penilaian kapasitas produksi yang dapat dilakukan. Seringkali perempuan dianggap kurang produktif dibandingkan laki-laki, meskipun jam kerjanya lebih panjang. Karena perempuan dianggap hanya membantu suaminya. Sehingga perempuan tidak diperhitungkan berkontribusi terhadap ekonomi dan tidak dianggap sebagai subjek yang perlu diperhitungkan situasi maupun pendapatnya.

*Peran masyarakat dan budaya yang menempatkan perempuan sebagai objek juga dirasakan oleh perempuan yang terlibat dalam konsultasi wilayah mengenai ketimpangan ekonomi dan gender.* Bahkan ketika perempuan memperjuangkan tanahnya

bersama dengan laki-laki, mereka seringkali ditempatkan pada peran-peran domestik seperti menyediakan konsumsi rapat. Hal ini yang dirasakan oleh Kelompok Perempuan Pejuang Seribandung (KPPS).

*Konflik agraria berkepanjangan* yang menjadikan perempuan kehilangan tanah sebagai sumber kehidupannya. Salah satunya adalah konflik agraria yang terjadi antara masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir berhadapan dengan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis yang telah terjadi selama lebih dari 3 dekade. Konflik agraria berkepanjangan ini disertai dengan kekerasan yang melibatkan aparat bersenjata dan penggusuran tanpa ganti kerugian yang layak. Jikapun ada niat untuk ganti rugi, dilakukan dengan banyak tekanan, intimidasi dan sikap represif aparat keamanan kepada masyarakat. Ganti rugi yang dilakukan diperhitungkan secara sepihak dan tidak adil.

#### ***Kotak 11. Cerita perempuan petani dari desa Seribandung***

*"Kami berjuang dari Desa sampai ke Pusat dengan berjalan kaki. Namun belum ada titik terang untuk mengembalikan tanah ulayat kami, tanah bercocok tanam juga sudah tidak ada lagi. Sedangkan kita hidup di dusun itu saja susah untuk bermukim, apalagi untuk berkubur untuk yang meninggal. Tidak ada tanah yang dapat dibeli lagi, banyak tanah yang sudah dijadikan kebun tebu PTPN VII Unit Cinta Manis"*



Aktivitas di pabrik tebu PTPN VII Cinta Manis. Foto dokumentasi oleh Solidaritas Perempuan Palembang

### *Kesimpulan*

Persoalan ketimpangan ekonomi dan gender yang dihadapi oleh perempuan di pedesaan memiliki dimensi yang khas dan berlapis. Bahkan ketika perempuan berupaya memperjuangkan haknya, masih tetap diperhadapkan dengan diskriminasi dan ketidakadilan gender lainnya. Hak atas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik hingga peluang kerja juga masih menjadi persoalan dalam pemenuhan maupun perlindungannya. Konflik agraria yang berkepanjangan menunjukkan bahwa Negara tidak melihat persoalan ini sebagai salah satu akar persoalan dari kemiskinan yang dihasilkan dari ketimpangan ekonomi dan gender di Sumatera Selatan. Negara hadir bukan untuk kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan perusahaan.



# MEMAKNAI KETIMPANGAN SEBAGAI KETIDAKADILAN GENDER DAN FEMINISASI PEMISKINAN

Ketimpangan tidak hanya terjadi secara vertikal antar kelas ekonomi, tetapi juga horizontal sebagai hasil dari perpotongan hierarki gender, ras, etnis, agama, dan kasta. Kemiskinan dapat dilihat sebagai status atau keadaan dan juga proses di mana keadaan tersebut menghasilkan situasi ketimpangan dan kemiskinan lainnya.<sup>9</sup> Paparan mengenai situasi ketimpangan ekonomi dan gender di enam wilayah sebelumnya merujuk pada ketidaksetaraan yang terjadi dalam perbedaan penghasilan, kesempatan dalam pekerjaan, akses terhadap dan kontrol atas pendidikan dan sumber daya, serta kuasa dan representasi di antara gender yang berbeda. Seperti yang tergali melalui konsultasi wilayah, sumber daya dalam keluarga tidak didistribusi dan kontrol secara adil, tetapi berkelindan dengan aspek gender—seringkali terjadi di mana laki-laki berperan sebagai kepala keluarga. Situasi kemiskinan terjadi lebih buruk akibat tidak diakuiinya kerja-kerja perempuan, pun kalau diakui pekerjaannya akan dibayar lebih murah dibandingkan laki-laki sehingga keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarga cenderung akan lebih miskin.<sup>10</sup> Ketimpangan ekonomi dan gender saling berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain yang muncul bukan hanya karena masalah perlakuan atau keterwakilan yang tidak setara bagi perempuan. Melainkan juga akibat dari kondisi dan hubungan ekonomi yang dilakukan untuk merugikan perempuan dan memperkuat stereotip gender sebagai pangkal dari berbagai bentuk ketidakadilan gender.

---

<sup>9</sup> Nader Fergany, "Monitoring the condition of the poor in the third world: some aspects of measurement," *ILO/WEP Research Working Paper WEP 10-6/WP52* (Geneva: ILO) hlm. 15.

<sup>10</sup> Naila Kabeer, "Gender, poverty, and inequality: a brief history of feminist contributions in the field of international development," *Gender & Development*, Vol. 23, No. 2 (2015): 193.

Ketidakadilan gender menjadi hambatan bagi perempuan untuk mendapatkan penghasilan yang layak, sekaligus membatasi peluang dan pilihan ekonomi yang tersedia. Kemiskinan sebagai proses adalah keterkaitan antara situasi ketimpangan di mana perempuan miskin akan tetap miskin, pun mereka yang tidak hidup di bawah garis kemiskinan akan berangsur menjadi miskin. Keluarga miskin akan semakin terpuruk apabila terdapat situasi tidak terduga seperti bencana alam, krisis, resesi, pandemi, maupun munculnya kebijakan ekonomi neoliberal. Dalam menghadapi berbagai situasi tersebut, muncul pola-pola respon rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka: mulai dari memotong jatah pangan yang dikonsumsi, mengonsumsi pangan kurang bergizi, berutang, membiarkan penyakit tidak ditangani, kerurangnya simpanan kebutuhan rumah tangga, menjual berbagai aset, anak putus sekolah, dan migrasi untuk bekerja sebagai buruh migran.<sup>11</sup> Pola demikian banyak dilakukan oleh perempuan sebagai pihak dalam keluarga yang dilekatkan pada peran perawatan dan reproduksi. Meskipun dampak tersebut dirasakan laki-laki dan perempuan, namun perempuan mengalami dampak yang berlapis baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

Namun model ekonomi yang saat ini dikembangkan memusatkan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang telah berada di puncak ekonomi. Tanpa membongkar penyebab struktural dari ketimpangan ekonomi ini, perempuan khususnya perempuan miskin, tidak akan pernah mendapatkan manfaat yang adil dari pertumbuhan ekonomi meskipun kontribusi mereka sangat besar. Bawa krisis global yang terjadi saat ini menunjukkan kelemahan dan kesesatan arsitektur sistem ekonomi kita selama setidaknya 3 dekade terakhir. Bagaimana sistem ekonomi yang dibentuk dan diatur membenarkan model akumulasi kapital (kapitalisme) melalui neoliberalisme dan patriarki. Sistem yang saling terkait ini yang harus dilawan dan dibongkar.

---

<sup>11</sup> Naila Kabeer, "Gender, poverty, and inequality: a brief history of feminist contributions in the field of international development," *Gender & Development*, Vol. 23, No. 2 (2015): 194.

Kelindan antara kapitalisme neoliberal dan patriarki, menjadikan pertumbuhan ekonomi tanpa batas sebagai tujuan akhir ekonomi. Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur kekayaan negara-negara di dunia, dimunculkan sebagai konsep numeral yang paling kuat dan dominan dalam paradigma pembangunan kita. Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang tanpa batas itu dilakukan dengan ekstraksi, eksplorasi dan penghancuran lingkungan, manusia, dan planet ini. Model pembangunan ekonomi semacam ini akan menyulitkan siapa pun, khususnya perempuan dan kelompok yang termarjinalkan lainnya yang menantang model ekonomi neoliberal dan kapitalis. Padahal bagi gerakan feminis, ekonomi tidak hanya sekedar dipahami sebagai sebuah fenomena kehidupan atau disiplin keilmuan yang sekedar menyebutkan perempuan dan gender dalam semua kebijakan ekonomi. Melainkan mewujudkan ekonomi yang adil, yang dapat mengakhiri segala bentuk ketimpangan, memastikan hak-hak asasi perempuan dan keberlanjutan dunia yang sehat bagi semua. Selama ini, ekonomi yang sesungguhnya sangat politis, seringkali dikemas menjadi hal yang teknis oleh sejumlah kecil elit untuk mengecualikan perempuan dan sebagian besar populasi dunia dari keterlibatan dalam proses perancangan dan pengambilan keputusannya.

Dengan demikian, situasi yang sulit yang dihadapi oleh perempuan dan sebagian besar populasi dunia bukanlah kemiskinan melainkan pemiskinan. Karena ia diciptakan dan dipelihara oleh segelintir elit. Dan karena ia seringkali berwajah perempuan, maka terjadilah feminisasi pemiskinan. Pada konteks feminisasi pemiskinan yang dihadapi, perempuan akar rumput di Komunitas Solidaritas Perempuan kemudian menegaskan 10 tuntutan kunci sebagai agenda untuk mendorong pembangunan ekonomi yang dapat mengatasi ketimpangan ekonomi dan gender, yakni:

**Tidak ada pembangunan tanpa persetujuan perempuan,** sehingga perempuan dengan beragam identitasnya perlu terlibat di dalam setiap tahapan proses pembuatan kebijakan dan memberikan persetujuan terhadap proyek atau program pembangunan.

**Menjalankan agenda reforma agraria sejati yang berkeadilan bagi perempuan**, dengan membongkar hegemoni kuasa atas tanah dan menjadikan perempuan sebagai subjek pemangku kepentingan dan melibatkan perempuan dalam perumusan kebijakan agraria sebagaimana dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jo TAP MPR No. IX Tahun 2021 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

**Mendemokratisasi arsitektur ekonomi dan keuangan global** yang mendorong solidaritas global dan perjuangan bersama untuk mengatasi krisis. Termasuk restrukturisasi sistem perdagangan global dengan melakukan perlakuan khusus dan berbeda (*special and differentiated treatment*) bagi negara berkembang dalam perjanjian perdagangan internasional. Serta menghilangkan aturan perdagangan yang mengatur tentang kekayaan intelektual dan mengantikannya dengan transfer dan berbagi pengetahuan serta menjaga pengetahuan tradisional dan praktek budaya.

**Mengakhiri pola produksi dan konsumsi yang eksplotatif dan tidak berkelanjutan**, untuk kemudian beralih dari privatisasi dan komodifikasi sumber daya menjadi paradigma *degrowth*<sup>12</sup> yang didasarkan pada produksi dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan adil.

**Menjamin pekerjaan yang layak, terutama bagi perempuan di sektor informal**, termasuk mengakui pekerja rumah tangga sebagai pekerja dimana mencakup pekerja rumah tangga migran yang tidak dapat diperlakukan diskriminatif.

**Membatasi kekuatan korporasi dalam tata kelola ekonomi global** dan mewajibkan korporasi untuk memenuhi kewajiban ekstrateritorial mereka, termasuk dengan memperkuat Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan memberlakukan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang mengatur korporasi transnasional untuk hak asasi manusia dan akuntabilitas. Juga membongkar sistem

---

<sup>12</sup> *Degrowth* sebagai sebuah langkah yang direncanakan untuk memperlambat aktivitas ekonomi sehingga mengurangi kerugian yang dialami oleh manusia dan alam.

perlindungan investor dan penyelesaian sengketa saat ini (*investor-state dispute settlement*).

**Memastikan respons perubahan iklim adil gender**, dengan menghentikan proyek dan kebijakan iklim yang melanggar HAM dan mengeksplorasi lingkungan. Seperti teknologi yang belum terbukti namun berisiko tinggi, antara lain geothermal dan pembangkit listrik tenaga air. Narasi dan dukungan keuangan untuk solusi palsu bagi krisis iklim, khususnya tentang net zero. Termasuk dengan memastikan pembiayaan iklim yang berfokus pada solusi nyata atas krisis iklim dengan memprioritaskan pengurangan emisi oleh negara, transisi yang adil dan merata, pendekatan berbasis ekosistem, dan penggantian kerugian serta kerusakan (*loss and damage*) sebagai tanggung jawab negara industri.

**Restrukturisasi dan pembatalan utang** untuk realokasi kekayaan publik dari melayani kreditur pemangsa dan penjajah ke aksi iklim dan layanan publik yang responsif gender untuk mengurangi beban kerja-kerja perawatan yang tidak dibayar serta pemulihan dari pandemi COVID-19.

**Membangun arsitektur pajak global yang adil dan merata**, termasuk menghentikan aliran *illicit financial flows* seperti penyalahgunaan pajak lintas batas. Negara juga perlu melakukan reformasi sistem pajak yang berkemajuan dan responsif gender dengan mengurangi ketergantungan atas pajak penjualan dan konsumsi yang membebani orang miskin secara tidak proporsional, peningkatan margin tarif pajak atas penghasilan orang-orang dengan berpenghasilan tertinggi dan perusahaan, serta mengakhiri insentif pajak untuk perusahaan multinasional.

**Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang tanggap gender** dengan upaya proaktif mengidentifikasi tantangan yang muncul akibat gender, membangun respon yang tepat serta membangun kerangka kerja akuntabilitas yang kuat dalam pemantauan dan tinjauan respon bencana.



## DAFTAR PUSAKA

Tax Justice UK. Pandemic Profits. September 2021. Diakses dari [https://www.taxjustice.uk/uploads/1/0/0/3/100363766/pandemic\\_profits\\_-final.pdf](https://www.taxjustice.uk/uploads/1/0/0/3/100363766/pandemic_profits_-final.pdf)

Oxfam. Briefing Paper: Survival of the Richest. Januari 2023. Diakses dari <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621477/bp-survival-of-the-richest-160123-en.pdf>

Oxfam. Press Release Richest 1% bag nearly twice as much wealth as the rest of the world put together over the past two years. 16 Januari 2023. Diakses dari <https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-much-wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years#:~:text=The%20richest%201%20percent%20grabbed,half%20of%20all%20new%20wealth>

World Inequality Report. Global inequality from 1820 to now: the persistence and mutation of extreme inequality. 2023. Diakses dari <https://wir2022.wid.world/chapter-2/>

BBC News. Indonesia earthquake Hundreds dead in Palu, Tsunami. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-45652460>

Wahana Lingkungan Hidup. Pernyataan Sikap Bersama: Presiden Jokowi meresmikan PLTA Poso di tengah Derita Berkepanjangan Warga. Maret 2022. Diakses dari <https://www.walhi.or.id/presiden-jokowi-meresmikan-plta-poso-di-tengah-derita-berkepanjangan-warga>

Fuadi Mardhatillah. Refleksi 17 tahun darurat militer merawat ingatan dampak kekerasan di Aceh. 20 Mei 2020. Diakses dari <https://kontrasaceh.or.id/refleksi-17-tahun-darurat-militer-merawat-ingatan-dampak-kekerasan-di-aceh/>

Edward Aspinall, M.C. Ricklefs, and Anthony Reid. *The Political Economy of Aceh and Its Conflict*. Published by NUS Press in 2011

Nader Fergany, "Monitoring the condition of the poor in the third world: some aspects of measurement," *ILO/WEP Research Working Paper WEP 10-6/WP52* (Geneva: ILO) hlm. 15.

Naila Kabeer, "Gender, poverty, and inequality: a brief history of feminist contributions in the field of international development," *Gender & Development*, Vol. 23, No. 2 (2015): 193.

Naila Kabeer, "Gender, poverty, and inequality: a brief history of feminist contributions in the field of international development," *Gender & Development*, Vol. 23, No. 2 (2015): 194.

*Degrowth* sebagai sebuah langkah yang direncanakan untuk memperlambat aktivitas ekonomi sehingga mengurangi kerugian yang dialami oleh manusia dan alam.



SP Aceh . SP Palembang . SP Lampung . SP Kinasih Yogyakarta . SP Mataram . SP Sumbawa  
SP Mamut Menteng . SP Anging Mammiri . SP Palu . SP Kendari . SP Sintuwu Raya Poso



Co-funded by  
The European Union



Solidaritas Perempuan  
Women's Solidarity for Human Rights